

KETERBUKAAN DAN AKUNTABILITAS PEJABAT PUBLIK (Kerangka Pemikiran dan Analisa Kasus Kepegawaian Kota Batu)

Oleh :

Himawan Estu Bagijo

(e-mail: Perspektif_keadilan@yahoo.com)
dosen UWKS

Jl. Dukuh Kupang XXXVI/ 54 Surabaya 60225 Telp./Fax : (031) 5674186.

Abstrac

Public servant have an obligation to transparent on public policy relatid to citizen interest. This value is one of the important point in the Democratic Government and Good Governance principles. To apply the principle of transparent and public accountability if's need General principle law of administration (government). The "Batu" case is "maldministration of public servant". The problem is the period and requirement of the promotion is caontradictive with regulation. But for all of the problem the Mayor of Kota Batu and Cief of Regional Adminitration of Public Servant Regional II East Java should be responsible.

Keywords: *Transparent, and Accountability of the Public Servant.*

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang modern dewasa ini tuntutan akan adanya peneyelenggaraan pemerintahan yang terbuka sudah tak terbendung. Terjadinya tuntutan besar ini di indikasikan tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi sudah menjadi kecendrungan global.

Era globalisasi ini oleh John Naisbitt digambarkan adanya sepuluh kecendrungan, yaitu: a. Dari Masyarakat Industri ke masyarakat informasi; b. Dari teknologi buatan ke teknologi canggih; c. Dari ekonomi nasional ke ekonomi dunia; d. Dari pandangan jangka pendek ke pandangan jangka panjang; e. Dari sentralisasi ke desentralisasi; f. Dari

bantuan kelembambagaan menjadi bantuan mandiri; g. Dari demokrasi perwakilan ke demokrasi partisipatif; h. Dari hubungan herarkhi ke hubungan jaringan kerjasama; i. Dari Utara (negara maju) ke Selatan (negara berkembang); j. Dari pilihan alternatif ke opsi berganda. (Megatren 2000 : 37).

Kesepuluh kecendrungan tersebt secara langsung sudah mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bernegara di Indonesia. Tuntutan dibukanya pasar bebas AFTA tahun 2003 telah memaksa pemerintah Indonesia untuk menyusun kebijakan ekonomi yang lebih terbuka. Dibukanya kran demokrasi melalui kebebasan membentuk partai politik juga